

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

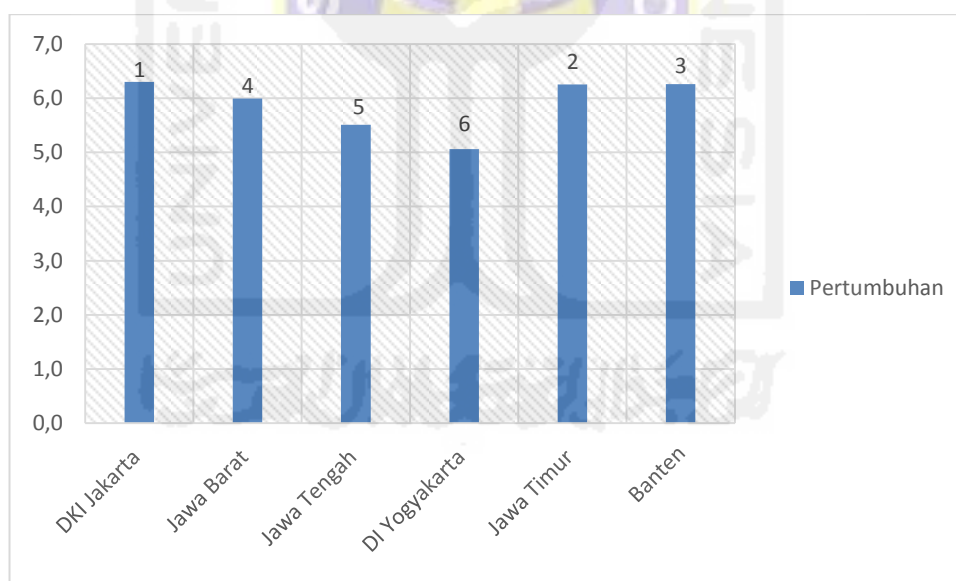
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan atau kinerja ekonomi daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Arsyad (1992), pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil per kapita meningkat dalam waktu lama. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil.

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi dijadikan tujuan utama negara- negara dunia ketiga guna mengejar ketertinggalan pola pembangunan negara maju. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ialah dengan lebih memfokuskan pembangunan pada sektor tersier. Sektor tersier sendiri mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor primer. Perubahan struktur ekonomi ini diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dimaksudkan untuk peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet. Namun

pertumbuhan yang tinggi terkadang menjadi paradoks dalam pembangunan sebab akan menimbulkan masalah distribusi pendapatan. Simon Kuznets telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis “U-terbalik” Kuznets, menurutnya distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Pada gambar dibawah ini terlihat jelas pertumbuhan ekonomi setiap daerah utamanya di pulau jawa mengalami tren kenaikan yang cukup tinggi.

Gambar 1.1

Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009 - 2013

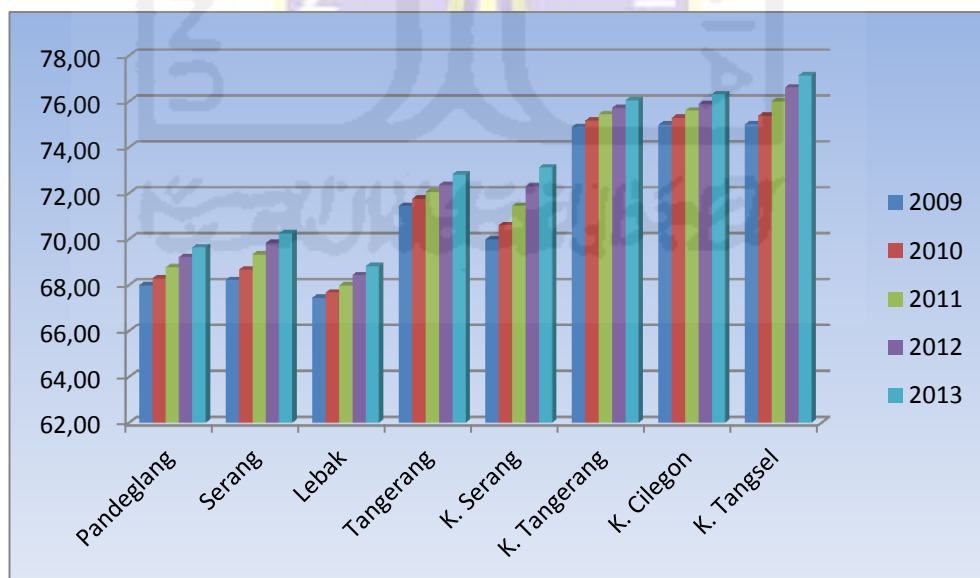


Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 1.1 merupakan data rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2008-2013. Dari data yang tersaji pada gambar 1.1, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa

mengalami tren pertumbuhan positif. Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa selama 5 tahun terakhir adalah DKI Jakarta yaitu diatas 6,30%. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis dan juga sebagai pusat pemerintahan sehingga terjadi konsentrasi kegiatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Setelah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah kedua yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu sebesar 6,25%, kemudian disusul Provinsi Banten dengan 6,23%, Jawa Barat 5,99%, Jawa Tengah 5,41% dan DI Yogyakarta sebesar 5,06%. Dari data-data yang disebutkan sebelumnya, terdapat salah satu provinsi yang digolongkan sebagai provinsi baru yang mampu bersaing atau memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu Provinsi Banten.

Gambar 1.2
Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009 - 2013



Sumber : Banten Dalam Angka 2014, diolah

Provinsi Banten merupakan provinsi yang terletak paling barat Pulau Jawa. Berbatasan dengan ibukota negara DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat membuat Provinsi Banten menjadi daerah paling strategis. Provinsi Banten merupakan bentukan provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-28 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan keunggulan strategis dari sisi lokasi, membuat perekonomian Banten bergerak cepat dan tumbuh dari tahun ke tahun.

Kondisi pemekaran akibat dari kebijakan otonomi daerah ini diharapkan pemerintah dapat lebih banyak berperan dalam proses pembangunan, karena mereka kini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Desentralisasi adalah bagaimana setiap daerah mampu mengelola anggaran pembangunan serta seluruh aspek ekonomi secara mandiri. Pengelolaan mandiri menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola penerimaan daerah secara efektif guna memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Pengelolaan dana daerah meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain sebagainya sebagai bentuk penerimaan daerah. Sidik (2002) mengatakan desentralisasi fiskal

merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi sendiri mulai diberlakukan pada tahun 2001 bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer yang dinamakan dana perimbangan. Disamping itu, kebijakan desentralisasi bertujuan untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah melalui peningkatan pajak, retribusi, ataupun melaksanakan bisnis melalui badan-badan usaha milik daerah.

Dalam undang-undang tersebut dikemukakan bahwa daerah akan memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang terdiri dari (a) bagian daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam; (b) Dana Alokasi Umum (DAU); (c) Dana Alokasi Khusus, ketiga alokasi dana tersebut, DAU merupakan alokasi terbesar; sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN (Hamid, 2004), pengalokasian tersebut dilakukan guna mencukupi belanja

pemerintah daerah yang relatif tidak dapat dipenuhi dengan bersumber dari keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Setiap tahun anggaran dana perimbangan pemerintah pusat cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung kepada anggaran dana perimbangan untuk kegiatan pembangunan daerah. Tercatat bahwa pada tahun 2004 realisasi dana alokasi umum sebesar Rp. 82.130,90 milyar meningkat menjadi sebesar Rp. 296,861.37 milyar pada Tahun 2013. dan realisasi dana perimbangan dari tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2004-2013 di Indonesia
(Dalam milyar rupiah dan persen)

Tahun	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total dan perkembangan
2004	37,900.80 (30,85%)	82,130.90 (66,85%)	2,835.90 (2,3%)	122,867.60 (100%)
2005	50,479.20 (35,25%)	88,765.40 (61,98%)	3,976.70 (2,77%)	143,221.30 (100%)
2006	64,900.30 (29,22%)	145,664.20 (65,58%)	11,566.10 (5,2%)	222,130.60 (100%)

Tahun	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Total dan perkembangan
2007	62,942.00 (25,80%)	164,787.40 (67,55%)	16,237.80 (6,65%)	243,967.20 (100%)
2008	78,420.20 (28,14%)	179,507.10 (64,41%)	20,787.30 (7,45%)	278,714.70 (100%)
2009	76,129.90 (26,50%)	186,414.10 (64,90%)	24,707.40 (8,6%)	287,251.50 (100%)
2010	89,618.40 (28,51%)	203,606.50 (64,77%)	21,138.40 (6,72%)	314,363.30 (100%)
2011	96,909.00 (25,90%)	225,553.70 (60,27%)	24,803.50 (13,83%)	374,246.20 (100%)
2012	105,961.29 (26,10%)	274,192.23 (67,54%)	25,826.59 (6,36%)	405,980.12 (100%)
2013	94,524.30 (22,48%)	296,861.37 (70,62%)	29,008.19 (6,9%)	420,393.87 (100%)

Sumber : DJPK Laporan Realisasi APBD, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 terjadi fluktuasi dana perimbangan dari tahun 2004 sampai 2013, pada tahun 2007 terjadi penurunan dimana dana bagi hasil menjadi Rp 62,942.00 milyar. Pada tahun 2009 terjadi kembali penurunan menjadi Rp 76,129.90. dan pada tahun 2013 hal serupa terjadi penurunan kembali dari Rp. 105,961.29 milyar ditahun 2012 menjadi Rp. 94,524.30 milyar ditahun 2013. Kondisi yang fluktuatif seperti penurunan dana bagi hasil pada tahun 2007, 2009 dan 2013, menandakan bahwa pemerintah kurang mampu untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang menjadi bagian pemerintah pusat seperti perolehan hak atas tanah dan bangunan serta sumber-sumber penerimaan non-pajak seperti penerimaan dari sumber daya alam sehingga terjadi penurunan dana bagi hasil.

Berbeda dengan dana alokasi umum yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Hal yang serupa juga ditunjukkan pada dana alokasi khusus yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa alokasi dana perimbangan sangat diperlukan oleh setiap daerah guna menjalankan operasional pembangunan daerahnya.

Pengalokasian dana perimbangan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat diberbagai daerah. Peningkatan kesejahteraan dalam aspek sumber daya manusia tersebut dapat pula menunjang kegiatan perekonomian kearah yang lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dananya untuk investasi pembentukan sumber daya manusia yang produktif. Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Menurut Mankiw (2003), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Pemerintah daerah dengan strategi alokasi anggaran yang tepat dapat menunjang penerimaan melalui pemakaian anggaran belanja modal. Alokasi dana oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dalam APBD bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Hal serupa juga diperkuat melalui pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa, dalam

era otonomi pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Sebab, Pelayanan dasar ini memiliki hubungan langsung terhadap permasalahan riil masyarakat daerah. Peran pemerintah daerah dalam hal pengalokasian anggaran menjadi kunci dalam kesuksesan suatu pembangunan modal manusia dengan berlandaskan kepada pelayanan umum. Pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat yang salah satunya dilihat melalui tingkat peradaban masyarakatnya (Donnelly, 1998).

Pemerintah Daerah terkadang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan anggaran dana perimbangan. Dana perimbangan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan laju pertumbuhan tidak serta merta sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa kecenderungan menunjukkan bahwa, kenaikan pertumbuhan ekonomi semata tanpa diikuti dengan kualitas pembangunan manusia yang baik, tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh berbagai literatur dan hasil penelitian, Basri Faisal dan Haris Munandar (2009) misalnya memasukkan masalah ini menjadi salah satu masalah struktural dalam perekonomian Indonesia, yang selama ini tidak disadari oleh pemerintah dan merupakan ancaman yang berbahaya bagi perekonomian negara. Mereka mengemukakan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi semata belum bisa meningkatkan secara signifikan masalah kesejahteraan manusia.

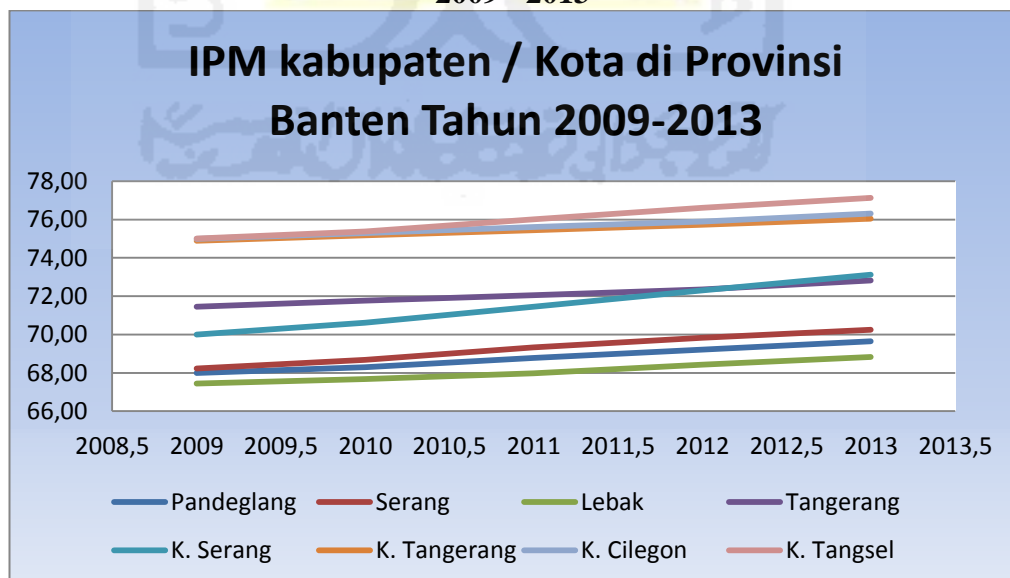
Kesejahteraan masyarakat sendiri semestinya tidak didefinisikan dalam arti yang sempit, yang hanya sekedar menggunakan besaran PDRB (maupun PDRB perkapita) sebagai pendekatan, melainkan harus melibatkan beberapa indikator lain yang dinilai menjadi unsur-unsur pendukung konsep kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India *Amartya Sen* dan *Mahbub ul Haq* seorang ekonom Pakistan dibantu oleh *Gustav Ranis* dari *Yale University* dan *Lord Meghnad Desai* dari *London School of Economics*. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lama bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita (Feriyanto, 2014). Berikut adalah data dari Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Banten dari tahun 2009 – 2013.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2009 – 2013

Kab / Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kab.Pandeglang	67,99	68,29	68,77	69,22	69,64
Kab.Lebak	67,45	67,67	67,98	68,48	68,82
Kab.Serang	68,22	68,67	69,33	69,83	70,25
Kab.Tangerang	71,45	71,76	72,05	72,36	72,82
Kota.Cilegon	74,99	75,29	75,60	75,89	76,31
Kota.Serang	69,99	70,61	71,45	72,30	73,12
Kota.Tangerang	74,89	75,17	75,44	75,72	76,05
Kota.TangSel	75,01	75,38	76,01	76,61	77,13

Sumber : Banten Dalam Angka 2014

Gambar 1.3
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota
di Provinsi Banten
2009 - 2013



Sumber : Banten Dalam Angka 2014, Diolah

Dalam Tabel 1.2, dari data IPM tahun 2009 – 2013 pada kabupaten/ kota di Provinsi Banten diketahui bahwa semuanya berada pada nilai antara 67,45 hingga 77,13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten digambarkan dengan grafik menunjukkan bahwa kabupaten dengan nilai IPM terendah adalah Kab.Lebak dengan nilai 67,45 pada tahun 2009, meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya namun belum mampu untuk menyusul nilai IPM 4 kabupaten/kota lainnya yang juga mengalami kenaikan. IPM tertinggi selalu dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan dengan nilai 77,13 pada tahun 2013. Pada gambar 1.1 diatas menjelaskan adanya kenaikan IPM untuk semua kabupaten/kota di Provinsi Banten, yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

Terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi perkembangan kualitas pembangunan manusia yakni masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Banten dapat menjadi kendala dalam proses pembangunan. Jumlah angka yang cukup tinggi mencapai 677,5 ribu jiwa pada tahun 2013 patut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan sendiri akan menghambat individu untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi semua hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang

rendah. Sehingga dalam perkembangannya akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Banten dapat dilihat dalam Tabel 1.3 ;

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin kab/kota Prov. Banten
2011-2013 (Dalam Ribu Jiwa)

Kabupaten / Kota	Tahun		
	2011	2012	2013
Kab. Pandeglang	117.644	121.100	109.100
Kab. Lebak	115.160	118.600	106.900
Kab. Tangerang	188.653	183.900	176.000
Kab. Serang	82.047	72.800	76.100
Kota. Tangerang	114.333	103.100	106.500
Kota. Cilegon	15.453	15.900	15.000
Kota. Serang	37.436	36.700	34.700
Kota. Tangsel	20.144	25.400	18.700
Provinsi Banten	690.870	677.500	642.900

Sumber: Indikator Ekonomi Banten 2014

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator dalam pembangunan ekonomi, hal ini karena didalam IPM terdapat beberapa komponen dasar yang antara lain; angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan yang layak sehingga dapat menunjukkan seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Banten pada khususnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka judul penelitian “ **Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**” dapat

memberikan gambaran analisis tentang sejauh mana peran bebarapa variabel tersebut dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia hasil kinerja pemerintah pusat melalui transfer dana perimbangan ke daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten ?
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten ?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa pengaruh dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Banten.
2. Menganalisa pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Banten.
3. Menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Banten.

4. Menganalisa pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Banten

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, selain itu penulis dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tiga bagian: *pertama*, kajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. *Kedua*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. *Ketiga*, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.